

Pembangunan, Kemiskinan, dan Demokrasi

Oleh: Teddy Lesmana

Peneliti pada Pusat Penelitian Ekonomi LIPI-Jakarta

Alumnus The Australian National University

Berbicara mengenai pembangunan, fokus perhatian kita selama ini selalu ditujukan kepada ukuran-ukuran kuantitatif seperti pertumbuhan produk domestik bruto (PDB), investasi, peningkatan pendapatan pribadi dan sebagainya. Keberhasilan suatu proses pembangunan pun kerap dipersepsikan sebagai meningkatnya dan terjadinya redistribusi fisik dari membaiknya indikator-indikator perekonomian di atas.

Di sisi lain, sejatinya keberhasilan pembangunan semestinya tidak hanya diukur dari indikator-indikator kuantitatif ekonomi di atas. Mengutip pandangan Profesor Amartya K. Sen mengenai pembangunan, yakni bahwa pembangunan seharusnya merupakan arena untuk perluasan kebebasan substantif (*substantive freedom*) bagi setiap orang. Dalam kerangka pemikirannya, menurut Sen, pembangunan mengharuskan berbagai sumber non-kebebasan (*non-freedom sources*) sudah seharusnya disingkirkan, yakni kemiskinan dan tirani, minimnya peluang ekonomi dan kemiskinan sosial sistematis, penelantaran sarana umum dan intoleransi, serta campur-tangan rezim represif yang berlebihan.

Pembangunan yang kita lakukan sejak orde baru hingga menjelang krisis yang menerpa Indonesia pada pertengahan tahun 1997 yang lalu, tak dapat dipungkiri memang menunjukkan keberhasilan Indonesia dalam pembangunan fisik yang cukup signifikan. Indonesia dapat dikatakan tergolong negara yang berhasil dalam pembangunan. Selama lebih dari tiga dekade yang lalu, Indonesia telah mencatat prestasi yang mengesankan dalam pembangunan manusia. Kemajuan dicapai di berbagai bidang, mulai dari pengurangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan hingga peningkatan harapan hidup dan kemampuan membaca dan menulis. Angka kematian bayi, misalnya, menurun tajam sejalan dengan peningkatan akses terhadap sarana kesehatan dan sanitasi. Pada periode yang sama, juga terjadi peningkatan peranan perempuan: perbedaan rasio pria-wanita di berbagai tingkat pendidikan semakin mengecil dan kontribusi wanita dalam pendapatan keluarga juga semakin membesar. Sementara itu, ketimpangan antar propinsi semakin menipis.

Akan tetapi, dibalik keberhasilan tersebut, pertanyaan selanjutnya yang perlu dijawab adalah apakah keberhasilan pembangunan tersebut memang telah dirasakan oleh segenap rakyat Indonesia? Lebih jauh, apakah pembangunan yang berhasil jika dilihat dari aspek fisik tersebut telah berhasil membebaskan rakyat dari berbagai kungkungan kemiskinan dan ketertinggalan berbagai dimensi kehidupan manusia?

Faktanya dewasa ini, pasca krisis 1997, menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia selama satu dekade terakhir bisa dikatakan konsisten berkisar 17-19 persen. Tingkat kemiskinan ini akan semakin tinggi lagi jika kita menggunakan garis kemiskinan (*poverty line*) Bank Dunia 2 dollar per hari yang menyebutkan bahwa separuh dari rakyat Indonesia (sekitar 49 %) tergolong miskin. Fenomena antrian beras, tingginya angka putus sekolah, dan rendahnya *Human Development Index* Indonesia merupakan fakta yang mewarnai hidup kebangsaan kita akhir-akhir ini.

Lebih jauh, di balik angka-angka kemiskinan tersebut, ada masalah-masalah krusial yang perlu kita cermati. Paradoks pembangunan dan maraknya kemiskinan di Indonesia tak lepas dari minimnya jika tidak mau dikatakan hampir tidak adanya akses bagi kaum miskin dalam hal pendidikan, kesehatan, dan partisipasi dalam kegiatan ekonomi yang seharusnya terbuka dari adanya proses pembangunan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Jeffrey Sachs dalam bukunya yang fenomenal *The End of Poverty : How We Can Make It Happen In Our Lifetime* (2005), kalangan miskin semakin terpuruk dan hampir

bisa dipastikan tidak memiliki kemampuan walau hanya untuk bergerak ke arah tangga pembangunan (*the ladder of development*) yang paling dasar sekali pun. Terbatasnya akses-akses bagi kalangan miskin menyebabkan mereka tak mampu untuk mengakumulasi kapital yang diperlukan baginya untuk keluar dari jebakan kemiskinan (*extreme poverty trap*). Konsekuensinya, kaum miskin tak mampu berperan aktif dalam kegiatan ekonomi dan mengambil berkah dari adanya pembangunan.

Pembangunan, seperti yang ditulis Sen di atas, semestinya memberikan akses yang merata bagi setiap orang. Sebagaimana yang ditulis oleh Ranis et al, (2006), pembangunan selain dari aspek yang sifatnya fisik-material, dimensi lainnya yang harus terbangun adalah pemberdayaan (*empowerment*), kebebasan politik, hubungan sosial, kesejahteraan masyarakat, keadilan, keamanan politik, keamanan ekonomi, dan kualitas lingkungan hidup yang lebih baik.

Kesempatan Emas

Keuangan Indonesia memiliki momen yang sangat cerah seperti yang dilansir oleh Bank Dunia dalam *The Wall Street Journal Asia* (12/02/2007) yakni setidaknya 15 miliar US Dollar berhasil 'ditabung' berkat pengurangan subsidi BBM dan pelunasan utang kepada IMF. Situasi yang dialami oleh Indonesia ini serupa dengan situasi di akhir dekade 1970-an ketika Indonesia memperoleh berkah bonanza hasil minyak bumi. Peluang emas ini hendaknya bisa disikapi dengan bijak oleh para elit bangsa ini untuk meningkatkan investasi pemerintah untuk kepentingan publik. Sebagaimana kita ketahui, sejak krisis hingga sekarang, perbaikan kualitas sarana publik seperti sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur penunjang lainnya bisa dikatakan terbengkalai. Inilah saatnya pemerintah baik di pusat maupun daerah untuk lebih mengutamakan perluasan akses bagi rakyat. Memerangi kemiskinan bukan hanya dengan memberikan uang melalui Bantuan Langsung Tunai dan Operasi Pasar saja, tetapi yang lebih penting adalah dengan memberikan peluang bagi kaum miskin dalam memperbaiki esensi kehidupannya sebagai manusia.

Dengan terangkatnya martabat kaum miskin ini, demokratisasi yang kita rintis tak hanya akan berhenti kepada demokrasi prosedural (*procedural democracy*) seperti yang kita alami saat ini. Rakyat yang terbebaskan dari kungkungan kemiskinan, tirani, dan terbatasnya akses berbagai dimensi kehidupan manusia sebagaimana yang diungkapkan di awal tulisan ini adalah hakikat dari pembangunan dan demokrasi itu sendiri yang perlu kita raih bersama.

Batam Pos, 7 Maret 2007